



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH

Ismanidar¹, Amirullah^{1*}, Saiful Usman¹

¹ Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

*Corresponding email: saiful_usman@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh” ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima serta persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh, dan (2) untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian ini dilaksanakan adalah di Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh. Subjek penelitian adalah masyarakat setempat sebanyak 10 orang. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: (1) Faktor utama pendorong muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima khususnya di Kota Banda Aceh adalah masalah ekonomi, kualitas SDM dan urbanisasi. (2) Persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima terbagi ke dalam dua jenis, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif antara lain masyarakat merasakan manfaat dan sering berbelanja di pedagang kaki lima karena harga barang yang dijual lebih murah dengan kualitas yang sama seperti barang yang dijual di toko dan supermarket. Sedangkan persepsi negatif antara lain keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi PKL yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, mereka juga sering membuang sampah sembarangan, serta dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota Banda Aceh.

Kata kunci: persepsi masyarakat, pedagang kaki lima



PENDAHULUAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur, dan menimbulkan kebisingan. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan. Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk menertibkan para PKL tersebut dengan menurunkan Satpol PP guna memberi peringatan dan arahan terlebih dahulu, dan kemudian menggusurnya secara paksa apabila para PKL tersebut tetap tidak menghiraukan peringatan dan arahan yang telah disampaikan. Namun sampai saat ini, fenomena PKL tetap tidak terkendali, seperti kata pepatah “mati satu tumbuh seribu.”

PKL sendiri memiliki banyak makna, ada pendapat yang mengatakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki Bondan” (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki penompang), sehingga timbulah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai PKL sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan atau trotoar yang lebarnya lima kaki (*five feet*) (Permadi, 2007:2).

Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen (Wibono, dkk, 2010:2).

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan PKL, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Walaupun sudah ditertibkan dan digusur berulang kali, para PKL tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Alasan mereka dari pada menganggur dan tidak bisa makan serta menghidupi keluarganya. (Permadi, 2007:9).

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil (Wibono, dkk, 2010:3).

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL



menuntut pemerintah untuk segera mencari tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi tentang keberadaan PKL tersebut, akhirnya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya sefiah mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana memperlahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

Pada aspek sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat perkotaan tercipta kegiatan yang bersifat formal dan informal yang merupakan sifat dualistik dalam perkotaan. Kegiatan formal sering diidentikkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada golongan kelas menengah ke atas, sedangkan kegiatan yang sifatnya informal banyak dilakukan oleh masyarakat golongan kelas menengah ke bawah atau kaum tersisih.

Dualistik perkotaan juga ditampilkan dalam evolusi historis sektor modern dan sektor tradisional yaitu dualistik teknologi. Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena dualistik perkotaan tersebut sering diakibatkan oleh ketidakmatangan perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota dimana kondisi dualistik ini sering berkembang dengan sendirinya secara spontan, tidak terencana dan liar. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan model dualistik pasar tenaga kerja di perkotaan yang menggunakan istilah sektor informal dan sektor formal, pedagang kaki lima (PKL) nampaknya akan menjadi jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal. (Yustika, 2000:230). Di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal dalam hal ini PKL tidak tentu mendatangkan masalah dalam aktivitas perkotaan namun terdapat sisi positif dalam sektor informal tersebut. Sektor informal dapat dianggap sebagai sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal (Sunyoto, 2006:50).

Beranjak dari uraian latar belakang di atas serta melihat banyaknya permasalahan yang timbul akibat keberadaan PKL, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian langsung mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh. Sebagai ibukota dari Provinsi Aceh, kota Banda Aceh merupakan salah satu kota padat dan mobilitas ekonomi yang tinggi sehingga menjadi daerah tujuan sebagian penduduk untuk mengadu nasib. Salah satu alternatif usaha yang relatif mudah dan tidak memerlukan modal yang besar adalah dengan membuka lapak berdagang di pinggir jalan atau disebut pedagang kaki lima (PKL). Oleh karenanya di kota Banda Aceh sangat banyak berlebaran pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini berjudul, **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja faktor yang mempengaruhi muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima di kota Banda Aceh?
- 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kota Banda Aceh?



LANDASAN TEORI

Persepsi

Menurut Toha (2008:143), “persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya lewat penglihatan, penginderaan, penghayatan, perasaan dan penciuman.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dimengerti bahwa persepsi adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk memahami setiap informasi yang diperoleh hasil dari tangkapan inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, penghayatan, dan penciuman.

Selanjutnya, Walgito (1980:20) menyebutkan bahwa, “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat indera.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang diawali oleh penginderaan hingga menghasilkan suatu pemahaman oleh perseptor.

Menurut Luthans (2005:194), “persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita.” Menurut Robinsin (1996:42), “persepsi merupakan proses kognitif dimana seorang individu memberi penafsiran terhadap lingkungannya.” Sedangkan menurut Mulyana (2006:5), persepsi atau perspektif merupakan “seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan yang secara layak dan masuk akal dilakukan orang.”

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau perspektif seseorang individu dalam memberikan respon dan penilaian terhadap suatu gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupannya.

Persepsi merupakan suatu hal yang selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari setiap individu sebagai akibat dari adanya suatu komunikasi. Persepsi seseorang selalu didasarkan pada penilaian terhadap informasi dari apa yang ditangkap oleh inderanya (Toha, 2008:141). Karenanya, persepsi setiap orang memungkinkan terjadi perbedaan karena penilaian setiap orang terhadap sebuah informasi tidaklah selalu sama.

Masyarakat

Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar.

Masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau *musyaraka* yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society*, yang sebelumnya berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti kawan (Basrowi, 2005:37).

Para ahli sosiologi telah memberikan definisi yang beragam tentang masyarakat tergantung dari sudut pandang masing-masing. Koentjaraningrat



(2009:2) merumuskan pengertian “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.” Defenisi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu perkumpulan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat dan terikat oleh suatu ikatan sosial.

Menurut Soekanto (2006:21), “masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.” Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu yang mempunyai interaksi yang besar antar sesama penduduk di dalam batas-batas tersebut.

Menurut Linton dalam Soekanto (2006:22), “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.”

Sedangkan Pelly dan Menanti dalam Basrowi (2005:39) mengemukakan pengertian masyarakat sebagai berikut:

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial tertentu. Anggota masyarakat itu memiliki rasa persatuan dan menganggap mereka memiliki identitas sendiri. Anggota-anggota masyarakat tersebut memiliki pengalaman hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, terdapat kerjasama dan pelebagaan atas dasar norma dan nilai-nilai yang dipedomani anggotaanggotanya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah di muka bumi dimana yang membentuk suatu sistem sosial dan terdapat norma-norma yang mengatur di dalamnya, baik norma yang terululis maupun norma tidak tertulis.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relative sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.

Pedagang kaki lima menurut An-Nat (1983:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan *feet* (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Permadi, pedagang kaki lima adalah semua pedagang yang berjualan di emperan toko dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan (2007:2).

Dalam sumber lain disebutkan bahwa pengertian pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh



penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian (<https://id.wikipedia.org>).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa pengertian Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap (Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa: “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau terlutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak” (Perda Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak, seperti becak, gerobak, mobil, dan lainnya, maupun sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta menempati tempat-tempat umum seperti trotoar di jalan raya, taman kota, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian ini dilaksanakan adalah di Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh. Subjek penelitian adalah masyarakat setempat sebanyak 10 orang. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis jawaban yang diberikan kepada informan tentang masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jawaban-jawaban tersebut dikumpulkan dan dikategorisasikan sehingga setiap kelompok berisi jawaban yang lebih kurang sejenis untuk kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Muncul dan Bertambahnya Pedagang Kaki Lima

Menurut Agustinus (2001:20), ada 3 faktor yang mendorong pedangang kaki lima, yaitu:

1. Aspek Ekonomi: Pemberdayaan PKL (usaha mikro) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan dengan menumbuhkan iklim usah yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya.
2. Aspek Sosial: Berkaitan dengan strategi penanganan PKL, aspek sosial dimaksud



antara lain mencakup: penguatan kelembagaan, kualitas SDM (pendidikan dan ketrampilan), migrasi penduduk, dan kriminalitas.

3. Aspek Lingkungan: Kondisi lokasi PKL secara umum tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, dimana aspek ini dapat memiliki nilai jual (citra dari lokasi tersebut).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa menurut masyarakat faktor utama pendorong muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima khususnya di Kota Banda Aceh adalah masalah ekonomi dan faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Para pedagang tersebut sebagian besar adalah masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa atau membeli toko karena harga sewa maupun harga jual toko di Banda Aceh relatif mahal, sehingga mereka terpaksa berjualan di pinggir jalan atau emperan toko. Mereka menjadi PKL juga karena tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga salah satu alternatif yang mereka ambil untuk mencukupi kebutuhan ekonomi adalah menjadi pedagang kaki lima. Banyak masyarakat mengakui bahwa mencari pekerjaan di Kota Banda Aceh sangat sulit khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill yang dapat diunggulkan, bahkan banyak dari golongan lulusan perguruan tinggi yang masih jadi pengangguran. Hal ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja/pengangguran, ditambah lagi jumlah masyarakat dari pelosok desa yang bermigrasi mengadu nasib ke kota semakin meningkat setiap tahunnya. Faktor inilah yang memicu semakin banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk mencari solusi lain, salah satunya adalah dengan membuka usaha sebagai pedagang kaki lima.

Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh dalam upayanya menertibkan para pedagang kaki lima agar dapat mengambil kebijakan dengan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat miskin seperti para PKL, dan tidak berlaku anarkis dan hanya menggusur paksa lapak PKL tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan selanjutnya terutama pihak PKL. Alternatif yang dapat diambil pemerintah Kota Banda Aceh antara lain dengan menyediakan lokasi berdagang yang lebih layak dan tertib kepada para PKL atau membuka lapangan pekerjaan baru serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membentuk skill dalam diri masyarakat yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Faktor lainnya menurut masyarakat yang berpengaruh terhadap muncul dan bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh adalah faktor urbanisasi. Menurut mereka banyak masyarakat dari daerah yang datang ke Kota Banda Aceh dengan tujuan awal untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan yang lebih layak dari di kampung halaman. Namun setelah sampai di Kota Banda Aceh sebagian dari mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena mayoritas berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill khusus, sehingga mereka beralih membuka usaha pedagang kaki lima sebagai solusi.

Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan masalah migrasi penduduk khususnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi karena perekonomian yang kurang bagus di desa daerah asalnya dan beranggapan bahwa dengan hijrah ke kota dapat mengubah nasibnya, akan tetapi pada kenyataannya merantau ke kota tidak menjamin ekonomi mereka menjadi lebih baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya bagi yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill atau kemampuan tertentu. Mereka malah kesulitan beradaptasi di kota sehingga pada akhirnya sebagian dari mereka mencari solusi lain seperti membuka lapak pedagang kaki lima yang dapat memberikan berbagai dampak negatif seperti mengganggu



ketertiban dan kebersihan kota, mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kemacetan, dan dampak negatif lainnya.

Oleh karenanya salah satu solusi yang dapat dilakukan khususnya bagi pemerintah adalah dengan membuka banyak lapangan kerja di daerah-daerah, mengadakan pelatihan dan pembinaan skil masyarakat dalam berbagai bidang seperti skil otomotif, skil elektronika, skil pertukangan, skil kerajinan tangan, skil pertanian dan peternakan, dan lain sebagainya serta memberikan bantuan modal usaha. Sehingga masyarakat yang telah mapan secara ekonomi tidak akan lagi berpikir untuk merantau ke kota untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka karena sudah memiliki perekonomian yang bagus di tempat sendiri.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima

Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan persepsi yang beragam dari masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Mengenai sebutan pedagang kaki lima, menurut masyarakat pedagang yang dinamakan PKL karena pedagang tersebut berjualan di pinggir jalan atau di emperan toko. Hal ini sudah sesuai dengan definisi pedagang kaki lima dari berbagai sumber yaitu pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan atau trotoar yang memiliki lebar 5 kaki/*feet* ($\pm 1,5$ m). Istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan satuan *feet* (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).

Masyarakat mengakui mereka sering bertransaksi di pedagang kaki lima dan mereka juga mengatakan merasakan manfaat dari keberadaan PKL. Bagi mereka berbelanja di pedagang kaki lima lebih mudah dan praktis dibandingkan berbelanja di toko atau supermarket karena posisinya yang langsung di pinggir jalan sehingga ketika ingin berbelanja tidak perlu ribet parkir dan terkadang mereka tidak turun dari kendaraan. Sedangkan jika mereka berbelanja di toko, mereka harus memarkirkan kendaraan mereka dengan sahaja kemudian berjalan masuk ke toko, dan saat selesai berbelanja mereka harus membayar uang parkir Rp.1000,- walaupun terkadang mereka hanya berbelanja barang yang ringan seperti minuman, rokok, atau yang lainnya. Tentu hal tersebut sangat menjengkelkan bagi sebagian masyarakat, terutama yang kelas ekonomi bawah dimana uang Rp.1000,- sangat berharga bagi mereka.

Selain itu, masyarakat juga mengatakan bahwa harga barang yang diperjualbelikan di pedagang kaki lima lebih murah karena mereka tidak perlu sewa toko, sehingga bertransaksi di pedagang kaki lima sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Sedangkan mengenai kualitas barangnya, masyarakat mengatakan kualitas barang yang dijual di pedagang kaki lima bagus karena sama saja dengan yang dijual di toko pada umumnya. Namun diharapkan agar lebih teliti terhadap kualitas barang yang dibeli ketika berbelanja di pedagang kaki lima karena para PKL sering ceroboh dan terkadang berprinsip “asal tidak rugi”, seringkali masyarakat menemukan barang yang dijual khususnya makanan dan minuman sudah kadaluarsa. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi konsumen seperti menimbulkan penyakit dan lain sebagainya, sehingga diharapkan untuk lebih berhati-hati ketika berbelanja di pedagang kaki lima.

Dampak positif lainnya dari pedagang kaki lima menurut masyarakat adalah pekerjaan PKL merupakan penyelamat masyarakat kecil dalam kondisi



perekonomian di Indonesia yang buruk atau tidak menentu. Mereka mengatakan sekarang ini mencari pekerjaan khususnya di Kota Banda Aceh sangat sulit karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga menurut mereka wajar jika banyak masyarakat memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima sebagai alternatif, karena PKL tidak terlalu banyak membutuhkan modal. Oleh karena itu mereka berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil, salah satunya dengan menciptakan atau menyediakan lapangan kerja yang cukup.

Akan tetapi, keberadaan pedagang kaki lima diakui oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan Kota Banda Aceh. Menurut masyarakat para PKL juga sering membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat dagangan mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan sehingga dapat menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan kota secara umum. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, khususnya kebersihan dan ketertiban Kota Banda Aceh.

Masyarakat juga mengatakan keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan lokasi tempat mereka berdagang rata-rata tidak memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin bertransaksi di PKL sering memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan.

Mengenai pengusuran pedagang kaki lima oleh Satpol PP masyarakat kurang setuju karena merasa kasihan terhadap nasib para PKL tersebut. Sebagian besar PKL tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga jika digusur mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Oleh sebab itu, responden berharap kepada pemerintah dapat membuat kebijakan yang baik agar tidak merugikan masyarakat kecil seperti para pedagang kaki lima, jika melakukan pengusuran dengan tujuan menertibkan kota maka pemerintah harus memikirkan solusi lain atau memindahkan lapak PKL ke lokasi yang lebih tertib.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Faktor utama pendorong muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima khususnya di Kota Banda Aceh adalah masalah ekonomi dan kualitas SDM. Para pedagang tersebut sebagian besar adalah masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa atau membeli toko sehingga mereka terpaksa berjualan di pinggir jalan atau emperan toko. Banyak masyarakat mengakui bahwa mencari pekerjaan di Kota Banda Aceh sangat sulit khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skil yang dapat diunggulkan, sehingga salah satu alternatif yang mereka ambil untuk mencukupi kebutuhan ekonomi adalah menjadi pedagang kaki lima.
2. Persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima terbagi ke dalam dua jenis, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif diantaranya masyarakat merasakan manfaat dari pedagang kaki lima dan mereka mengaku



sering bertransaksi di pedagang kaki lima karena harga barang yang dijual lebih murah dengan kualitas yang sama seperti barang yang dijual di toko dan supermarket. Sedangkan persepsi negatif dari pedagang kaki lima menurut masyarakat adalah keberadaannya dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi PKL yang sembrat dan tidak tertata dengan rapi, mereka juga sering membuang sampah sembarangan. Dampak negatif lainnya dari PKL yaitu dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota Banda Aceh karena lokasi tempat mereka berdagang rata-rata tidak memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin bertransaksi di PKL sering memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Alumni
- Alwasilah, Cheader. 2009. *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- An-nat, B. 1993. *Implementasi Kebiasaan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Basrowi dan Suwadi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Luthans, Fred. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudhistira
- Robinsin. 1996. *Pengantar Psikologi*. Bandung: Angkasa
- Saputra, Rholen Bayu. 2014. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan*. Riau: Universitas Riau
- Setyawan, Dodiet Aditya. 2012. *Konsep Dasar Masyarakat*. Surakarta: Poltekkes Kemenkes Surakarta
- Shadily, Hasan. 1990. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pembangunan



-
- S., Margono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudjana. 2005. *Statistik Penelitian Pendidikan*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2008. *Migran Dianggap Sebagai Beban daripada Potensi*,
(www.suarasurabaya.net, diakses tgl 12 Maret 2015)
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada
- Todaro dan Smith. 2006. *Peranan Harga Pokok dalam Penentuan Harga Jual*.
Jakarta: Rineka cipta
- Walgito, Bimo. 1980. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Wibono, Andreas Tri, dkk. 2010. *Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima*
(*PKL*). Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 2015. *Pedagang Kaki Lima*, (<https://id.wikipedia.org>,
diakses 12 Maret 2015)